

Daftar Pustaka

Buku

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Amri, Agus Suryono dan Suwondo. 2009. Pengembangan Sumberdaya Aparatur sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja: Studi di Kantor Sekretariat daerah Kabupaten Sumbawa. *Wacana*, Vol. 12 No. 3 Juli 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jilid II. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- _____. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- _____. 2011. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Boboy Max. 1994. *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Perspektif Sejarah dan Tatanegara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Budiarjo, Miriam dan Ambong, Ibrahim. 1995. *Fungsi Legislasi dan Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Budiarjo, Miriam. 1989. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- _____. 1994. *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Effendy, Onong Uchjana. 2000. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Handyaningrat, S. 1985. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Cetakan Keenam. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Handoko, T. H. 2003. *Manajemen* Cetakan Kedelapanbelas. Yogyakarta: PFE Yogyakarta.
- Hasibuan, M. S. 2007. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah* Edisi Revisi Cetakan Keenam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hersey, P. and K. H. Blanchard. 1999. *Leadership and the One Minute Manager*. New York: William Norrow

- Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi (Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Jenning, Sir Ivor. 1956. *The Law and the Constitutions*. London: Univ. of London Press.
- Jugiyanto, H. M. 1999. *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Andi Yogyakarta: Yogyakarta.
- Locke, John. 1960. *Two Treatises of Civil Government*. London: J.M Dent and Sons Ltd
- Lubis, M Solly. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Bandung: Offset Alumni
- Marbun, B. N. 1993. *DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa depannya*. Jakarta:Erlangga
- Miles, Matthew M. Michael, Huberman. and Johny, Salanda. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. London: SAGE Publications, Inc
- Moelong, Lexy. J. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- _____. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- _____. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- _____. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- Moenir, H. A. S. 2001. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bummi Aksara
- Naning, Ramdlon. 1982. *Lembaga Legislatif sebagai Pilar Demokrasi dan Mekanisme Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Liberty.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan)*. Jakarta: Gramedia.
- Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Strauss, Anselm dan Corbin, Juliet. 2009. *Basic of Qualitative Reasearch (Grounded Theory Procedure and Techniques)*. Penerjemah oleh Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukabdarumidi. 2004. *Metodelogi Penelitian: Praktis untuk Penelitian Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Suny, Ismail. 1985. *Pembagian Kekuasaan Negara*. Jakarta: Aksara Baru.
- Suryanto. 2006. *Reformasi Kebijakan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah*, Jurnal Desentralisasi Vol. 7 No. 4.
- Syamsuddin, Haris. 1998. *Menggugat Politik Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Utama Grafitri.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2000. *Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Jurnal, Artikel, dan Tesis

- Jaya, Panky Saputra. 2015. "Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa (APBDes) tahun 2014". Bandar Lampung: Universitas Lampung. Diakses 26 Maret 2017. <http://digilib.unila.ac.id/9701/>.
- Marisi, Akhmad. 2016 "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur". e-Journal Ilmu Pemerintahan Vol.4 No.3 Hal 981-994. Diakses 15 Maret 2017. ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id.
- Masuara, Rico. 2013. "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu Studi di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)". Manado: Universitas Sam Ratulangi. Diakses 26 Maret 2017.

- Putra, Andhika Della Permana. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri". Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diakses 26 Maret 2017.
- Susanti, Fitria Manda Sari dan Sofia Achnes. "Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Mulya Subur". Pekanbaru: Universitas Riau. Diakses 26 Maret 2017.
- Wiryan, I Wayan Gde, dkk."Pelaksanaan Fungsi Legislasi Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli". Artikel Tim Pengajar Universitas Mahasaraswati Denpasar. Diakses 26 Maret 2017. <http://ojs.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/4/4>.
- Wismar E. 2004. "Analisis Peranan Badan Legislatif Daerah Dalam Pembentukan Perda (Studi di DPRD Kota Yogyakarta)". Tesis. Yogyakarta: Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada.
- Yuhandra, Erga. 2016."Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Sebuah Telaah Proses Pembentukan Perdes di Desa Karamatwangi Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan)". Jurnal Unifikasi. Vol.3 No.2. Diakses 26 Maret 2017. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/view/410/336>.

Sumber Lain

- <http://jateng.tribunnews.com/2017/02/06/badan-permusyawaratan-desa-dianggap-belum-berperan-maksimal>, diakses 26 Februari 2017.
- <http://nasional.kompas.com/read/2016/12/13/15423211/audit.kinerja.parlemen>, diakses 16 April 2017.
- <http://nasional.kontan.co.id/news/dpr-gagal-capai-target-pengesahan-ruu-tahun-2015>, diakses 16 April 2017.
- <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/10/20/kinerja-parlemen-belum-maksimal>, diakses 16 April 2017.
- www.dpr.go.id, diakses 16 April 2017.

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa.